

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN TES WAWASAN KEBANGSAAN PEGAWAI KPK DI MEDIA VIVA.CO.ID

Galih Akbar Prabowo

Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Ponorogo
galihakbar77@gmail.com

Abstrak : Perkembangan teknologi komunikasi berimplikasi pada banyak bidang, salah satunya adalah jurnalistik. Dalam bidang jurnalistik, implikasi dari perkembangan teknologi komunikasi salah satunya ditandai dengan banyak munculnya media online. Bukan sekedar mengandalkan kecepatan penyampaian informasi, kehadiran media online juga memungkinkan terjadinya diversifikasi isu yang diberitakan. Setiap media online memiliki perbedaan dalam memberitakan sebuah isu. Hal ini tak lepas dari ideologi dan kepentingan politik yang dimiliki oleh sebuah media online itu sendiri. Saat ini, isu yang sedang hangat dibicarakan publik adalah polemik terkait tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana sebanyak 75 orang pegawai tidak lulus dalam tes tersebut. Viva.co.id merupakan salah satu media online yang menyoroti isu tersebut dan menjadikannya sebagai headline dalam pemberitaannya. Dengan adanya dinamika terkait kepentingan politik dari pemilik Viva.co.id, tentu akan menarik untuk melihat lebih dalam terkait framing pemberitaan isu tes wawasan kebangsaan pegawai KPK oleh media Viva.co.id. Oleh sebab itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis framing pemberitaan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK di media Viva.co.id. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing. Adapun analisis framing yang digunakan adalah model Zhongdang Pan dan Kosicki. Subjek kajian dalam penelitian ini adalah teks pemberitaan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK di media Viva.co.id pada tanggal 25-31 Mei 2021. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan *framing* pemberitaan Viva.co.id terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK dilakukan melalui pemilihan headline, penulisan lead dan latar informasi, pengutipan sumber berita, penonjolan beberapa aspek dari 5W + 1H, pemilihan koherensi, serta penggunaan leksikon. Viva.co.id mengkonstruksi *image* positif KPK dalam polemik Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK. Ini dibuktikan dengan dalam pemberitaannya, Viva.co.id menonjolkan aspek-aspek yang mendukung KPK. Framing yang dilakukan oleh Viva.co.id tidak lepas dari tendensi politiknya yang sejalan dengan kepentingan politik pemiliknya, yakni mendukung pemerintah.

Kata Kunci : KPK, Viva.co.id, Pemberitaan, Analisis Framing

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi membawa dampak yang cukup besar dalam berbagai bidang, salah satunya bidang jurnalistik. Dampak perkembangan teknologi komunikasi di bidang jurnalistik ini salah satunya ditandai dengan muncul dan berkembangnya media online. Media online, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) adalah semua bentuk fasilitas berbasis internet yang digunakan untuk melakukan aktivitas jurnalistik sesuai dengan Undang-undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang disahkan oleh Dewan Pers¹. Dalam praktek pemberitaannya, media online tidaklah bebas nilai. Ada anggapan bahwa kemampuan untuk mempersuasi dan mengkonstruksi preferensi politik khalayak dimiliki oleh media online. Pandangan ini ditangkap oleh pemilik media online sebagai dasar untuk menggunakan media online sebagai alat untuk mempengaruhi preferensi politik dari khalayak².

Dalam memberitakan sebuah peristiwa, media online biasa melakukan pembingkaiian atau *framing*. *Framing* ini dilakukan dengan cara menonjolkan aspek yang dianggap penting dan mengesampingkan aspek yang dianggap tidak penting dari sebuah peristiwa. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembingkaiian berita, antara lain kepentingan ekonomi dan politik, praktek dan batasan organisatoris, *belief system*, serta usaha untuk mempengaruhi audiens³. Satu hal yang paling umum digunakan sebagai dasar pembentukan *framing* adalah kepentingan politik media. Kepentingan politik dalam pemberitaan acapkali memunculkan bias. Tokoh politik sebagai pemilik media memanfaatkan media guna menyebarkan kepentingannya. Problematika kian mencuat ketika pemilik media turun ke ranah politik dan memanfaatkan media guna menyebarluaskan pesan politiknya⁴. Media dan politik memang memiliki hubungan timbal balik. Media membutuhkan tokoh politik guna keuntungan ekonomi sedangkan politik membutuhkan media guna menyebarkan

¹ Asep Syamsul M. Romli, "Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online (Dilengkapi Kiat Blogger, Teknik SEO, dan Tips Media Sosial)", Cet.1. (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012), 30.

² Intan Permata Sari, "Keberpihakan Media Dalam Pemilihan Presiden 2014," *Jurnal Penelitian Komunikasi* 21, no. 1 (July 20, 2018): 73–86, <https://doi.org/10.20422/jpk.v21i1.488>.

³ R. H. Wicks. "Messaging Framing and Constuctioning Meaning : An Emerging Paradigm in Mass Communication Research". (New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2005), 342-343.

⁴ Nader Sheykh Al Eslami Kandlousi, Anees Janeer Ali, and Anahita Abdollahi, "Organizational Citizenship Behavior in Concern of Communication Satisfaction: The Role of the Formal and Informal Communication," *International Journal of Business and Management* 5, no. 10 (September 17, 2010), <https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n10p51>.

gagasannya kepada khalayak⁵. Tokoh politik kemudian mengambil keuntungan dari situasi ini guna berasosiasi dengan media. Parsialitas dan sokongan politis pada pemilik ditunjukkan oleh media⁶.

Viva.co.id merupakan portal media online yang dikelola oleh PT. Viva Media Baru, bagian dari PT. Visi Media Asia Tbk dan tergabung dalam Viva Group yang dimiliki dan dipimpin oleh Anindya Bakrie. Anindya Bakrie ini sendiri adalah anak dari Aburizal Bakrie, tokoh Partai Golkar. Afiliasi Viva.co.id dengan tokoh politik ini tentu mempengaruhi *framing* pemberitaan yang dilakukan oleh Viva.co.id itu sendiri. Lebih jauh, tidak menutup kemungkinan pula, Viva.co.id ini digunakan sebagai alat politik guna mempengaruhi opini publik terkait sebuah isu, utamanya dalam bidang politik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Viva.co.id konsisten dalam memberitakan berbagai isu di bidang politik dalam setiap edisinya.

Isu yang berkembang dan banyak diperbincangkan publik beberapa waktu belakangan ini adalah polemik terkait tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana sebanyak 75 orang pegawai tidak lulus dalam tes tersebut. Tes wawasan kebangsaan di lingkup Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan bagian dari proses penentuan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun dalam pelaksanaannya, tes wawasan kebangsaan ini kemudian memunculkan berbagai permasalahan. Tes wawasan kebangsaan ini dianggap melanggar Hak Asasi Manusia sebab tidak sesuai dengan jaminan konstitusi dimana setiap orang berhak memiliki pekerjaan serta memperoleh penghasilan yang sesuai. Disebutkan pula oleh pegawai KPK bahwa dalam tes wawasan kebangsaan ini ada dugaan pelecehan seksual dimana terdapat beberapa pertanyaan yang berbau seksual dan menjurus pada hal-hal yang bersifat privasi. Permasalahan-permasalahan tersebut memunculkan dugaan bahwa tes wawasan kebangsaan yang dilaksanakan itu adalah usaha melemahkan KPK.

Viva.co.id merupakan salah satu media yang menyoroti polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK ini. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Viva.co.id menjadikan polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK sebagai *headline* dalam

⁵ W. R. Jati. "Politik Persuasif Media: Peran Media Dalam Pemilu Presiden Indonesia 2001-2009", Jurnal Penelitian Politik, 2013, 18.

⁶ Muh. Bahrudin. "Tantangan Regulasi Penyiaran: Pencitraan Politik Di Era Konvergensi Media - Repositori Universitas Dinamika," accessed June 22, 2021, <https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/1086/>.

pemberitaannya, terutama di edisi bulan Mei 2021. Dengan adanya afiliasi Viva.co.id dan tokoh partai politik, yakni Partai Golkar tentu akan menarik untuk meneliti *framing* media Viva.co.id dalam pemberitaan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK serta bagaimana tendensi politik Viva.co.id mempengaruhi *framing* pemberitaan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan analisis *framing* pemberitaan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK di media Viva.co.id. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* dipakai dalam penelitian ini. *Framing* sendiri ditujukan untuk mengidentifikasi sudut pandang media yang digunakan untuk mengkonstruksi sebuah peristiwa. Sudut pandang inilah yang kemudian menentukan bagian dari peristiwa yang akan diambil atau dihilangkan serta arah pemberitaan⁷. Data penelitian dikumpulkan menggunakan observasi dan dokumentasi. Adapun obyek kajian dalam penelitian ini adalah teks pemberitaan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK di media Viva.co.id pada tanggal 25-31 Mei 2021. Data penelitian dianalisis dengan *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang membagi struktur teks dalam empat dimensi, yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Empat dimensi struktur teks ini menciptakan sejenis tema yang mengkaitkan antara makna proposisi dalam wacana dengan kerangka acuan wacana dalam realita⁸.

PEMBAHASAN

Media Online Dan Kepentingan Politik

Media online merupakan salah satu bentuk dari *new media*. *New media* dapat dipahami juga sebagai digital media. Digital media merujuk pada bentuk dari konten media yang mengkombinasikan dan mengintegrasikan data, tulisan, audio, dan unsur visual yang tersimpan secara digital dan tersebar melalui kabel fiber optik, satelit, dan sistem transmisi gelombang mikro⁹. Dalam konteks media online, digitalisasi konten dipicu oleh hal-hal tertentu. Misalnya adalah mahalnya biaya produksi. Kini bisnis surat kabar menghadapi sebuah tantangan besar. Penyediaan bahan mentah, termasuk wartawan, dan upaya memasarkan surat kabar bukanlah hal yang mudah, ditambah

⁷ Bimo Nugroho, dkk. *Politik Media Mengemas Berita*. (Jakarta : Institut Studi Arus Informasi, 1999), 21.

⁸ Alex Sobur. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 175.

⁹ Terry Flew. *New Media : An Introduction*, 2nd Edition. (Australia : Oxford University Press, 2005), 2.

kompetisi yang semakin ketat. Dana penyediaan naskah dan penerbitan mencapai hampir setengah nilai jual semua surat kabar. Penerbit mengalami kerugian apabila surat kabar yang terjual jumlahnya rendah. Bahan baku untuk pencetakan surat kabar sulit untuk diperoleh dan sulit untuk mengetahui jaringan yang menjual bahan baku tersebut¹⁰.

Seiring dengan perkembangannya, media online dapat diklasifikasikan dalam lima kategori, yakni situs berita edisi online dari surat kabar, situs berita edisi online dari radio, situs berita edisi online dari televisi, situs informasi independen yang tidak berafiliasi dengan media konvensional, serta situs indeks berita. Secara mendasar, media online berbeda dengan media konvensional. Karakteristik khas yang dimiliki oleh media online antara lain multimedia, aktualitas, kecepatan, fleksibilitas, dan kapasitas yang luas. Kelemahan berupa akurasi yang terabaikan kerap kali mempengaruhi kredibilitas media online. Kebenaran berita dalam media online sering dipertanyakan sebab pada umumnya media online lebih mengutamakan kecepatan dalam memberitakan sebuah peristiwa. Selain itu, berbeda dengan surat kabar yang proses produksi beritanya melewati beberapa pihak seperti, wartawan, editor, hingga redaktur, produksi berita di media online bisa dilakukan oleh satu orang saja. Inilah yang kemudian menyebabkan proses verifikasi berita yang akan dimuat di media online terbilang lemah.

Media online pada dasarnya juga memiliki tugas dan fungsi yang sama layaknya media konvensional. Secara umum, pers berfungsi melayani tuntutan informasi di berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun internet¹¹. Secara umum, fungsi media meliputi fungsi informatif, fungsi kontrol, fungsi interpretatif dan direktif, hingga fungsi ekonomi. Dalam prakteknya, tugas dan fungsi media bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan media dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah isu kepemilikan dan kepentingan politik media itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri, media menyalurkan dan mendukung sistem ekonomi dan politik yang spesifik pula. Bukan sekedar peran ekonomi dan sosial, tetapi peran ideologis juga dilakukan oleh media. Situasi yang dijumpai di tingkat kepemimpinan media, praktek pemberitaan, dan

¹⁰ William L. Rivers, et.al. *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Edisi 2. (Jakarta : Prenada Media, 2003), 191.

¹¹ Muhammad Budyatna. *Jurnalistik Teori Dan Praktek*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), 27.

dinamika industri media memiliki korelasi yang mempengaruhi satu sama lain dengan situasi ekonomi politik yang berjalan di sebuah negara¹².

Bisnis media di era global, menunjukkan adanya fenomena integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah upaya perusahaan untuk memiliki beberapa jenis media sekaligus. Tidak sedikit korporasi yang menguasai beberapa macam bisnis media, seperti koran, majalah, radio, dan TV, sebagai contohnya¹³. Fenomena integrasi vertikal tersebut dapat dilihat dari tren bisnis media di Indonesia beberapa tahun belakangan dimana kelompok usaha media televisi mulai merambah bisnis koran, baik cetak ataupun online. Integrasi vertikal dalam industri media ini umumnya dilakukan salah satunya oleh tokoh politik. Kepemilikan media oleh tokoh politik dapat menyebabkan media menjadi alat politik, dimana praktek pemberitaan media merepresentasikan kepentingan politik dari pemilik media dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang politik.

Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosnicki

Analisis *framing* yang dicetuskan oleh Pan dan Kosnicki adalah pengembangan perspektif operasional *discourse analysis* Van Dijk. Pan dan Kosnicki mengelompokkan empat perspektif sistem dari naskah berita sebagai instrumen *framing*, yakni sintaksis, skrip, tematik, dan sintaksis. Empat perspektif sistem ini mengkonstruksi sebuah topik yang mengkorelasikan arti asumsi dalam wacana dengan konsep rujukan wacana tersebut dalam realita.

Tabel 1
Kerangka *Framing* Pan dan Kosnicki

Struktur	Instrumen Framing	Aspek yang Diamati
Sintaksis Cara wartawan mengkonstruksi fakta	Skema Berita	<i>Headline, Lead, Latar Informasi, Kutipan, Sumber, Pernyataan, Penutup</i>
Skrip Cara wartawan menceritakan fakta	Kelengkapan Berita	5W + 1H

¹² Agus Sudibyo. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. (Yogyakarta : LKiS, 2004), 2.

¹³ Shirley Biagi. *Media/Impact : Pengantar Media Massa*, Edisi 9. (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), 16.

Tematik Cara wartawan menulis fakta	Detail Maksud Kalimat, Hubungan Nominalisasi Antar Kalimat Koheresi Bentuk Kalimat Kata ganti	Paragraf, Proposisi
Retoris Cara wartawan menekankan fakta	Leksikon Grafis Metafora Pengandaian	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik

a. Struktur Sintaksis

Definisi sintaksis ialah urutan kata atau frasa dalam kalimat. Dalam berita, urutan ini merujuk pada pemahaman terkait susunan dan bagian berita. Unsur ini nantinya akan menunjukkan arah berita yang ditulis oleh wartawan. Model sintaksis yang banyak digunakan adalah piramida terbalik, dengan menulis bagian penting di bagian awal berita dan bagian yang tidak penting di akhir berita. Susunan piramida terbalik terdiri atas *headline*, *lead*, episode, latar, dan penutup¹⁴.

1. *Headline* merupakan unsur sintaksis dan wacana yang paling menonjol. *Headline* menjadi alat untuk mengarahkan isu yang akan dikembangkan.
2. *Lead* umumnya menggambarkan perspektif wartawan dalam menyampaikan berita.
3. Latar merupakan bagian yang berada di awal berita. Latar akan mempengaruhi penulisan isi berita. Umumnya, penulisan latar dipengaruhi oleh subyektifitas wartawan. Aspek yang ingin dimunculkan adalah pembaca akan menyepakati tulisan dari wartawan sebab latar belakang sudah diajukan terlebih dulu.
4. Pengutipan sumber berita umumnya menggambarkan keberpihakan. Pengutipan sumber merupakan cara mengkonstruksi subyektivitas. Pembaca dapat semakin diyakinkan terkait isi berita yang ditulis. Terdapat tiga aspek dalam pengutipan sumber sebagai instrumen *framing* yakni, mendukung kebenaran, mendukung

¹⁴ Eriyanto, Eri. Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. (Yogyakarta : LKiS, 2008), 295-296.

hal-hal tertentu dari pemikiran sumber berita, dan menonjolkan atau mengesampingkan sebuah masalah.

b. Struktur Skrip

Skrip merupakan suatu langkah untuk memfokuskan salah satu aspek dari berita tanpa disadari oleh pembaca. Dalam konteks *framing*, 5W + 1H ada kalanya tidak disertakan. Hal ini didasarkan pada unsur mana yang akan ditonjolkan atau dikesampingkan oleh wartawan. Misalnya, wartawan lebih menekankan pada unsur *Who* dan mengesampingkan unsur *How* dalam berita.

c. Struktur Tematik

Tematik adalah bagian dimana wartawan menegaskan arah pemberitaannya. Hal ini dilakukan dengan cara pemilihan kalimat yang dipakai sampai dengan penulisan sumber dalam keseluruhan naskah.

1. Detail memiliki hubungan dengan kendali informasi. Di tahap ini, selain memilih sumber yang akan digunakan, wartawan juga akan mengolah hasil wawancara dengan narasumber. Melalui cara ini, pengaruh kepada audiens dapat lebih besar.
2. Koheresi merupakan keterkaitan antar kata atau kalimat. Terdapat tiga bentuk koheresi, yakni koheresi sebab-akibat yang bercirikan penggunaan kata sebab atau karena. Ke dua, koheresi perjelas yang digunakan untuk memperjelas kalimat menggunakan kata dan, lalu, kemudian. Terakhir, koheresi pembeda yang bercirikan penggunaan kata sedangkan atau dibandingkan.

d. Struktur Retoris

Retoris adalah instrumen yang digunakan wartawan untuk membuktikan kepada pembaca apa yang ditulis adalah sesuai dengan realita di lapangan. Unsur dari struktur retoris ialah :

1. Leksikon yang dilakukan dengan pemilihan kata guna menekankan aspek tertentu dari berita serta menciptakan kesan. Umumnya wartawan menggunakan kata-kata tertentu guna mendeskripsikan sebuah kejadian.

2. Grafis digunakan untuk memberikan penekanan pada aspek tertentu pada berita.

Hal ini dapat dilakukan dengan pengolahan visual tipografi dengan menggunakan huruf miring, garis bawah, maupun ukuran huruf yang berbeda.

Selain itu, grafis juga dapat diaplikasikan dengan unsur gambar, foto, maupun grafik guna memberikan penekanan pada aspek yang ditonjolkan dalam berita.

HASIL

Analisis Framing Pemberitaan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK di Media

Viva.co.id

Analisis Berita 1

Judul : Prof. Romli : Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Mandat UU ASN¹⁵

Tabel 2
Analisis Framing Pan dan Kosnicki Berita 1

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Prof. Romli : Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Mandat UU ASN
	<i>Lead</i>	Prof. Romli menyatakan bahwa instruksi presiden tentang pegawai KPK yang tidak lulus TWK harus disikapi tidak hanya oleh KPK namun juga MenpanRB dan Kepala BKN.
	Latar Informasi	Sikap itu sesuai dengan kewenangan KemenpanRB terkait aturan tentang pegawai KPK menjadi ASN.
	Kutipan Sumber	Prof. Romli Atmasasmita Pakar Hukum Pidana <ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut terhadap perintah presiden harus dilakukan oleh KPK, MenpanRB, dan Kepala BKN. • Keputusan KPK untuk tidak memecat pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan sudah tepat, sebab yang berwenang memecat adalah KemenpanRB • Ketidakpuasan terhadap instruksi perpindahan tugas pegawai KPK kepada pimpinan adalah konsekuensi hukum atas ketidaklulusan dalam Tes Wawasan Kebangsaan, dimana yang lulus memperoleh reward, alih alih punishment. Apabila reward dan punishment tidak diberlakukan, itu merupakan pelanggaran

¹⁵ Bayu Nugraha, "Prof. Romli : Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Mandat UU ASN", Viva.co.id, 25 Mei 2021, [http : www.viva.co.id/berita/nasional/1375256-prof-romli-tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk-mandat-uu-asn](http://www.viva.co.id/berita/nasional/1375256-prof-romli-tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk-mandat-uu-asn).

		terhadap perintah Undang-undang ASN dan Peraturan pemerintah tentang Alih Tugas pegawai KPK menjadi ASN.
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini dari wartawan, hanya pernyataan dari Prof. Romli Atmasasmita
	Penutup	Pernyataan Prof. Romli Atmasasmita bahwa ia menyayangkan protes dari koalisi guru besar dan masyarakat anti korupsi atas support kepada pegawai KPK
Struktur Skrip	What	Keputusan KPK menonjokkan pegawai yang gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan dianggap tepat
	Where	-
	When	25 Mei 2021
	Who	Prof. Romli Atmasasmita
	Why	Karena yang berwenang memberhentikan pegawai KPK adalah MenpanRB, kecuali MenpanRB mendelegasikannya kepada pimpinan KPK
	How	Ketidakpuasan terhadap instruksi perpindahan tugas pegawai KPK kepada pimpinan adalah konsekuensi hukum atas ketidaklulusan dalam Tes Wawasan Kebangsaan, dimana yang lulus memperoleh reward, alih alih punishment. Apabila reward dan punishment tidak diberlakukan, itu merupakan pelanggaran terhadap perintah Undang-undang ASN dan Peraturan pemerintah tentang Alih Tugas pegawai KPK menjadi ASN.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Keseluruhan alinea dalam berita berisi pandangan Prof. Romli yang membenarkan keputusan KPK
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	Penggunaan kata “sudah benar” serta “prihatin dan malu” dalam pernyataan Prof Romli Atmasasmita

a. Analisis Struktur Sintaksis

Berita ini menggunakan judul “Prof. Romli : Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Mandat UU ASN”. Penggunaan judul ini menyiratkan bahwa berita diarahkan untuk menggambarkan bahwa tidak ada yang salah dengan Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh KPK sebab sudah sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. *Lead* berita ini mendukung judul berita dimana arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo terkait nasib pegawai KPK yang gagal dalam TWK harus ditindak lanjuti, tidak hanya oleh KPK, namun juga oleh MenpanRB dan

Ketua BKN. Latar informasi berita ini mengarahkan pembaca untuk menyepakati tulisan wartawan bahwa sikap KPK itu sesuai dengan kewenangan KemenpanRB terkait aturan tentang pegawai KPK menjadi ASN.

Dari aspek pengutipan sumber, pemilihan Prof. Romli sebagai satu-satunya narasumber dalam pemberitaan mengindikasikan kecenderungan wartawan berpihak pada Prof. Romli. Di sini wartawan menarik audiens untuk memandangi fenomena yang diberitakan menggunakan pendapat pribadi melalui argumen yang dilontarkan Prof. Romli sekaligus menguatkan indikasi bahwa wartawan mendukung Prof. Romli terkait statemennya yang membenarkan keputusan KPK melaksanakan Tes Wawasan Kebangsaan.

b. Analisis Struktur Skrip

Struktur skrip menunjukkan bahwa berita ini berupaya untuk menyampaikan bahwa keputusan KPK menonaktifkan pegawai yang tidak gagal dalam TWK sudah tepat. Ini bisa diketahui dari aspek *what*, yakni “Romli menilai sikap pimpinan KPK dalam menonaktifkan ke 75 pegawai tersebut dirasa sudah benar”. Hal ini diperkuat dengan aspek *why*, yang menyatakan bahwa pemberhentian yang berwenang memberhentikan pegawai KPK adalah MenpanRB, kecuali MenpanRB mendelegasikannya kepada pimpinan KPK.

c. Analisis Struktur Tematik

Dari struktur tematik, utamanya koherensi, berita ini memancing pembaca untuk mengetahui fakta-fakta terkait keputusan KPK. Fakta-fakta itu secara urut disampaikan dari alinea satu sampai lima. Alinea satu dan dua menunjukkan hubungan sebab akibat, dimana di alinea satu disebutkan bahwa arahan presiden tidak hanya wajib diikuti oleh KPK, tetapi MenpanRB dan juga Kepala BKN dan di alinea dua disebutkan bahwa sikap itu sesuai dengan kewenangan KemenpanRB terkait aturan tentang pegawai KPK menjadi ASN. Alinea selanjutnya menyiratkan bahwa keputusan KPK untuk menonaktifkan pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan dirasa sudah benar. Berita ditutup dengan kekecewaan Prof. Romli terhadap sikap koalisi guru besar dan masyarakat anti korupsi terhadap dukungan ke 75 pegawai KPK.

d. Analisis Struktur Retoris

Berdasarkan struktur retorik, terutama leksikon, terlihat bahwa wartawan berusaha menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dengan Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh KPK serta keputusan KPK menonaktifkan pegawai yang gagal dalam TWK. Ini dapat dibuktikan di alinea ke tiga dimana wartawan memakai kata “sudah benar” dalam menuliskan statemen Prof. Romli bahwa keputusan KPK untuk tidak memecat pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan sudah tepat, sebab yang berwenang memecat adalah KemenpanRB. Kemudian, di alinea ke lima digunakan kata “prihatin dan malu” yang merefleksikan adanya kekecewaan terhadap sikap koalisi guru besar dan masyarakat anti korupsi terhadap dukungan ke 75 pegawai KPK tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

2. Analisis Berita 2

Judul : TWK Pegawai KPK Disebut Buat Pemberantasan Korupsi Lebih Sistematis¹⁶

Tabel 3
Analisis Framing Pan dan Kosnicki Berita 2

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	TWK Pegawai KPK Disebut Buat Pemberantasan Korupsi Lebih Sistematis
	<i>Lead</i>	Pakar Komunikasi Emrus Sihombing menyatakan TWK merupakan salah proses dalam perubahan status pegawai KPK menjadi ASN yang ditujukan agar pemberantasan korupsi lebih sistematis.
	Latar Informasi	Apalagi, perubahan status itu juga merupakan perintah Undang-Undang (UU) dan sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
	Kutipan Sumber	1. Pakar Komunikasi Emrus Sihombing <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih terorganisir • Dugaan adanya beberapa Lembaga pemerintah yang tidak mengindahkan instruksi presiden terkait pegawai yang gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan tidak terbukti • Keputusan menonaktifkan beberapa pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan sudah benar dan pegawai tersebut bisa berkontribusi di luar KPK.

¹⁶ Bayu Nugraha. “TWK Pegawai KPK Disebut Buat Pemberantasan Korupsi Lebih Sistematis”, Viva.co.id, 27 Mei 2021, http://www.viva.co.id/berita/nasional/1375700-twk-pegawai-kpk-disebut-buat-pemberantasan-korupsi-lebih-sistematis?page=all&utm_medium=all-page.

		<p>2. Kepala KSP Moeldoko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengabaian instruksi presiden oleh beberapa lembaga pemerintah tidak terjadi. Instruksi telah dilakukan oleh KPK dengan berkoordinasi bersama beberapa kementerian dan lembaga dan menawarkan pembinaan sebagai solusi sesuai instruksi presiden.
	Pernyataan/Opini	Opini wartawan yang mengatakan bahwa perubahan status itu merupakan perintah Undang-Undang (UU) dan sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
	Penutup	Sebelumnya, Kepala KSP Moeldoko mengatakan pengabaian instruksi presiden oleh beberapa lembaga pemerintah tidak terjadi. Instruksi telah dilakukan oleh KPK dengan berkoordinasi bersama beberapa kementerian dan lembaga dan menawarkan pembinaan sebagai solusi sesuai instruksi presiden.
Struktur Skrip	What	Pakar Komunikasi Emrus Sihombing menyatakan TWK merupakan salah proses dalam perubahan status pegawai KPK menjadi ASN yang ditujukan agar pemberantasan korupsi lebih sistematis.
	Where	Jakarta
	When	27 Mei 2021
	Who	Pakar Komunikasi Emrus Sihombing
	Why	Perintah Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara berlaku bagi seluruh pegawai KPK. Karena, pegawai KPK bukanlah yang menyusun Undang-undang tersebut, namun melainkan yang melaksanakannya.
	How	Pimpinan KPK dapat melaksanakan pembinaan melalui Pendidikan kedinasan sesuai arahan presiden.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Alinea awal berisi pendapat Pakar Komunikasi Emrus Sihombing menilai TWK merupakan salah proses dalam perubahan status pegawai KPK menjadi ASN yang ditujukan agar pemberantasan korupsi lebih sistematis. Berita ditutup dengan Sebelumnya, Kepala KSP Moeldoko mengatakan pengabaian instruksi presiden oleh beberapa lembaga pemerintah tidak terjadi. Instruksi telah dilakukan oleh KPK dengan berkoordinasi bersama beberapa kementerian dan lembaga dan menawarkan pembinaan sebagai solusi sesuai instruksi presiden.

Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	Penggunaan kata “sistematis” dalam pernyataan Emrus Sihombing
------------------	----------------------------------	---

a. Analisis Struktur Sintaksis

Judul berita ke dua adalah “TWK Pegawai KPK Disebut Buat Pemberantasan Korupsi Lebih Sistematis”. Penggunaan judul ini mengindikasikan wartawan mengarahkan pengembangan berita pada penekanan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan ini dilakukan untuk kepentingan perbaikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini diperkuat dengan aspek *lead* yang berisi statemen Emrus Sihombing yang menyatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK ditujukan agar pemberantasan korupsi menjadi lebih sistematis. Latar informasi dalam berita ke dua ini menyiratkan bahwa tidak ada yang salah dari Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh KPK sebab merupakan bagian dari proses pengangkatan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam aspek pengutipan sumber, hasil wawancara yang ditulis oleh wartawan mengarah pada membenaran terkait Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh KPK. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara yang ditulis oleh wartawan, baik wawancara dengan Emrus Sihombing maupun dengan Moeldoko. Dalam berita ke dua ini, wartawan juga menulis opini pribadinya yang menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK tersebut juga merupakan perintah Undang-Undang (UU) dan sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan kata lain telah sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN. Di sini, subyektivitas wartawan menguatkan indikasi bahwa Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh KPK sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan.

b. Analisis Struktur Skrip

Dari struktur skrip, terlihat bahwa berita ke dua ini berupaya menegaskan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan dilakukan oleh KPK untuk tujuan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari ditonjokannya aspek *what*, yaitu “Pakar Komunikasi Emrus Sihombing menilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi agar lebih sistematis” dan aspek *why*, yang berbunyi perintah Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara berlaku bagi seluruh pegawai KPK.

Karena, pegawai KPK bukan yang menyusun Undang-undang, melainkan yang melaksanakannya.

c. Analisis Struktur Tematik

Dari struktur tematik, berita ini mengangkat topik tentang tujuan dilaksanakannya Tes Wawasan Kebangsaan oleh KPK. Paragraf awal berita dibuka dengan pernyataan Emrus Sihombing yang mengatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK dilakukan untuk menjadikan upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih sistematis dengan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. Paragraf selanjutnya berisi tentang arahan Presiden Jokowi terkait dengan tindak lanjut pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan dan penyangkalan terhadap isu adanya pihak-pihak terkait yang mengabaikan arahan Presiden Jokowi tersebut. Berita ditutup dengan penegasan bahwa tidak ada pengabaian terhadap arahan Presiden Jokowi yang disampaikan oleh Moeldoko. Berdasarkan struktur tematik ini, tersirat bahwa wartawan mendukung pernyataan Emrus Sihombing dan Moeldoko yang membenarkan Tes Wawasan Kebangsaan bagi pegawai KPK dan membantah adanya pengabaian terhadap arahan Presiden Jokowi.

Dari aspek koherensi, terdapat koherensi perjelas antara alinea lima dan enam. Di alinea lima ditulis bahwa perintah Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara berlaku bagi seluruh pegawai KPK. Karena, pegawai KPK bukan yang menyusun Undang-undang, melainkan yang melaksanakannya. Lalu, di alinea enam ditulis bahwa lebih lanjut, Direktur Eksekutif Emrus Corner tersebut menilai tindakan menonaktifkan pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan sudah benar dan pegawai tersebut bisa berkontribusi di luar KPK. Koherensi perjelas ini menguatkan indikasi bahwa wartawan memberikan penekanan bahwa mekanisme yang dilakukan oleh KPK itu sudah tepat dan sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara.

d. Analisis Struktur Retoris

Diksi “sistematis” dalam pernyataan Emrus Sihombing menggambarkan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh KPK ditujukan untuk tujuan yang baik, yakni meningkatkan upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih sistematis.

3. Analisis Berita 3

Judul : Pimpinan KPK Klaim Sudah Perjuangkan Nasib Pegawai Tak Lulus TWK¹⁷

Tabel 4
Analisis Framing Pan dan Kosnicki Berita 3

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Pimpinan KPK Klaim Sudah Perjuangkan Nasib Pegawai Tak Lulus TWK
	<i>Lead</i>	Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengklaim bahwa lima pimpinan sudah berusaha memperjuangkan nasib para pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Ghufron beralih upaya pimpinan pupus karena adanya sistem peralihan status.
	Latar Informasi	Ghufron lebih jauh menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi para pegawai KPK dalam rangka alih status menjadi ASN. Salah satunya yakni mengikuti TWK.
	Kutipan Sumber	Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron <ul style="list-style-type: none"> • Kami semua bukan hanya memperjuangkan tapi kami menyayangi mereka semua. Tapi kami juga harus memahami ada perbedaan sistem antara pegawai KPK dan aparat sipil negara • Bahwa peralihan status pegawai KPK mempunyai kekuatan hukum dapat dipastikan melalui Tes Wawasan Kebangsaan sebagai prosedur yang sah • Oleh sebab itu, yang diangkat sebagai ASN adalah pegawai yang memenuhi syarat ASN
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini wartawan, hanya pernyataan dari wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
	Penutup	Sementara 24 pegawai KPK lainnya dinilai masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Mereka akan diminta kesediaannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara.
Struktur Skrip	What	Pimpinan KPK sudah perjuangkan nasib pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan
	Where	Kantor KPK

¹⁷ Ezra Sihite & Edwin Firdaus. "Pimpinan KPK Klaim Sudah Perjuangkan Nasib Pegawai Tak Lulus TWK", Viva.co.id, 27 Mei 2021, [http : www.viva.co.id/berita/nasional/1375753-pimpinan-kpk-klaim-sudah-perjuangkan-nasib-pegawai-tak-lulus-twk?page=all&utm_medium=all-page](http://www.viva.co.id/berita/nasional/1375753-pimpinan-kpk-klaim-sudah-perjuangkan-nasib-pegawai-tak-lulus-twk?page=all&utm_medium=all-page)

	When	27 Mei 2021
	Who	Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
	Why	Ghufron beralih upaya pimpinan pupus karena adanya sistem peralihan status.
	How	Dalam proses alih status menjadi ASN, tekan Ghufron, para pegawai KPK hanya kurang persyaratan mengikuti TWK. Sementara syarat terkait uji kompetensi tidak dites ulang karena KPK masih memiliki data para pegawai saat bergabung.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Tiga alinea awal dari berita berisi pernyataan Ketua KPK bahwa mereka telah memperjuangkan nasib pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan namun terbentur aturan. Dalam proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara semua persyaratan harus dipenuhi, termasuk Tes Wawasan Kebangsaan sebab alih status pegawai KPK bukan sekedar ganti jabatan.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	Penggunaan kata “memperjuangkan” dan “menyayangi” dalam pernyataan wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

a. Analisis Struktur Sintaksis

Judul yang dipilih dalam berita ini adalah “Pimpinan KPK Klaim Sudah Perjuangkan Nasib Pegawai Tak Lulus TWK”. Pemilihan judul ini mengarahkan berita pada pembentukan opini bahwa KPK peduli dan memiliki itikad baik kepada pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. *Lead* berita yang menyatakan bahwa lima pimpinan KPK telah memperjuangkan nasib pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan namun terbentur sistem peralihan status menggambarkan perspektif positif wartawan pada KPK dalam menulis berita. Latar informasi dalam berita ini yang menyatakan bahwa untuk alih status menjadi Aparatur Sipil Negara pegawai KPK harus mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan mendorong pembaca untuk menyepakati bahwa Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan KPK sudah tepat dan merupakan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai KPK yang ingin alih status menjadi Aparatur Sipil Negara.

Pemilihan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron sebagai satu-satunya narasumber menunjukkan keberpihakan wartawan. Di sini pembaca diajak untuk memberikan penilaian positif terhadap statemen pribadi Nurul Ghufron. Kutipan wawancara dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang dimunculkan di berita secara substantif menyatakan bahwa KPK memiliki kepedulian dan itikad baik kepada pegawai KPK

yang gagal dalam TWK dengan memperjuangkan nasib mereka namun terbentur mekanisme persyaratan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. Dari kutipan wawancara yang dimunculkan ini, tersirat bahwa wartawan mendukung hal-hal tertentu dari pemikiran sumber berita.

b. Analisis Struktur Skrip

Dari struktur skrip, berita ini menggambarkan sisi positif dari KPK dengan menonjolkan upaya yang dilakukan dan hambatan yang dihadapi oleh KPK dalam memperjuangkan nasib pegawai yang gagal dalam TWK. Ini dapat dilihat dari unsur *what*, yaitu “Pimpinan KPK sudah perjuangkan nasib pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan” dan unsur *how*, yakni ”dalam proses alih status menjadi ASN, tekan Ghufron, para pegawai KPK hanya kurang persyaratan mengikuti TWK. Sementara syarat terkait uji kompetensi tidak dites ulang karena KPK masih memiliki data para pegawai saat bergabung”. Dari unsur *how* tersebut dapat dilihat bahwa KPK sebenarnya sudah memberikan keringanan kepada pegawai KPK yang ingin alih status menjadi Aparatur Sipil Negara dengan tidak melakukan tes ulang syarat berupa uji kompetensi. Ini menunjukkan keberpihakan KPK kepada pegawainya yang ingin alih status menjadi Aparatur Sipil Negara.

c. Analisis Struktur Tematik

Dalam struktur tematik, berita ini mengusung topik upaya KPK dalam memperjuangkan pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. Hal ini diuraikan dalam alinea awal berita yang menyatakan bahwa pimpinan KPK sebenarnya sudah memperjuangkan nasib pegawai KPK yang gagal dalam TWK namun terbentur dengan sistem peralihan status. Alinea selanjutnya berisi tentang kewajiban pegawai KPK untuk mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan untuk alih status menjadi Aparatur Sipil Negara. Alinea berikutnya berisi tentang persyaratan pegawai KPK untuk alih status menjadi Aparatur Sipil Negara hanya kurang Tes Wawasan Kebangsaan, dimana uji kompetensi tidak akan dilakukan tes ulang. Dari analisis struktur tematik ini, dapat dilihat bahwa wartawan menonjolkan kepedulian KPK terhadap pegawainya dengan sudah berupaya membantu dan memperjuangkan nasib mereka meski terbentur sistem peralihan status.

Dalam konteks koheresi, pada alinea tiga terdapat koheresi sebab akibat. Di alinea tiga tersebut ditulis “Sementara syarat terkait uji kompetensi tidak dites ulang

karena KPK masih memiliki data para pegawai saat bergabung”. Dari koheresi sebab akibat ini dapat dilihat wartawan berupaya menyiratkan sisi positif KPK dimana KPK juga memberikan keringanan kepada pegawainya yang ingin alih status menjadi Aparatur Sipil Negara dengan tidak melakukan tes ulang terkait uji kompetensi.

d. Analisis Struktur Retoris

Dari struktur retorik, diksi “memperjuangkan” dan “menyayangi” dalam berita, menunjukkan kecenderungan wartawan untuk menggambarkan kepedulian Pimpinan KPK terhadap nasib pegawai KPK yang gagal dalam TWK.

4. Analisis Berita 4

Judul : Ngabalin Sebut Tuduhan Lemahkan KPK Lewat TWK Menyesatkan¹⁸

Tabel 5
Analisis Framing Pan dan Kosnicki Berita 4

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Ngabalin Sebut Tuduhan Lemahkan KPK Lewat TWK Menyesatkan
	<i>Lead</i>	Adanya tuduhan dari berbagai pihak untuk melemahkan KPK melalui TWK bagi pegawai yang akan diangkat menjadi ASN dikritik oleh Kantor Staf Presiden (KSP).
	Latar Informasi	Tuduhan melemahkan KPK tidak beralasan sama sekali. Termasuk tuduhan adanya campur tangan dan usaha menyingkirkan pihak-pihak tertentu.
	Kutipan Sumber	Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin <ul style="list-style-type: none"> • Itu adalah tuduhan yang sungguh menyesatkan publik • Tidak ada orang yang bisa mengintervensi, lihat di Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK 2. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK memiliki rapor merah dan tidak bisa dilakukan pembinaan. Sementara itu, 24 pegawai yang tidak lolos TWK akan dilakukan pembinaan terkait wawasan kebangsaan.
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini wartawan, hanya pernyataan

¹⁸ Bayu Nugraha. “Ngabalin Sebut Tuduhan Lemahkan KPK Lewat TWK Menyesatkan”, Viva.co.id, 30 Mei 2021, http://viva.co.id/berita/nasional/1376214-ngabalin-sebut-tuduhan-lemahkan-kpk-lewat-twk-menyestakan?page=all&utm_medium=all-page.

		Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
	Penutup	Pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahwa sebanyak 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK memiliki rapor merah dan tidak bisa dilakukan pembinaan. Sementara sisanya akan dilakukan pembinaan terkait wawasan kebangsaan.
Struktur Skrip	What	Adanya tuduhan dari berbagai pihak untuk melemahkan KPK melalui TWK bagi pegawai yang akan diangkat menjadi ASN dikritik oleh Kantor Staf Presiden (KSP).
	Where	Jakarta
	When	29 Mei 2021
	Who	Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin
	Why	Karena KPK sudah melaksanakan prosedur yang tepat dalam Tes Wawasan Kebangsaan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara mengacu pada Undang-undang KPK yang baru, sehingga campur tangan dalam KPK terkait TWK dapat dibantah.
	How	Maka, ia menghimbau pegawai yang gagal dalam TWK agar tidak mencari kambing hitam. Dengan kata lain, jika mekanisme penilaian dilakukan dan kemudian hasilnya tidak lolos maka tidak perlu menyalahkan unsur atau pihak lain.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Paragraf pertama berisi tentang kritik terhadap tuduhan adanya pelemahan KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan. Paragraf selanjutnya menyatakan bahwa KPK telah melaksanakan proses alih status pegawai menjadi ASN dengan benar merujuk pada Undang-undang KPK yang baru. Paragraf berikutnya berisi tentang KPK tidak bisa diintervensi sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Paragraf selanjutnya berisi permintaan Ngabalin agar pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan tidak menyalahkan unsur atau pihak lain.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	Penggunaan kata “menyesatkan” dalam pernyataan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin.

a. Analisis Struktur Sintaksis

Headline dari berita ini adalah “Ngabalin Sebut Tuduhan Lemahkan KPK Lewat TWK Menyesatkan”. Melalui penggunaan *headline* tersebut, wartawan berupaya menonjolkan wacana bahwa Tes Wawasan Kebangsaan tidak dilaksanakan dengan

tujuan negatif, dalam hal ini berupa upaya pelemahan KPK. *Lead* dalam berita ini ditulis oleh wartawan menyiratkan upaya untuk mengkonstruksi opini publik bahwa tuduhan berupa upaya pelemahan KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan adalah suatu hal yang tidak benar sama sekali. Latar informasi berita yang memuat gagasan bahwa tidak ada intervensi atau upaya untuk menyingkirkan pihak-pihak tertentu melalui Tes Wawasan Kebangsaan disusun untuk mendukung gagasan yang terdapat dalam *lead* berita.

Penentuan Ali Mochtar Ngabalin sebagai narasumber utama dalam berita menyiratkan adanya kecenderungan wartawan untuk mendukung pernyataan Ali Mochtar Ngabalin yang menyatakan bahwa tuduhan pelemahan KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan adalah sesuatu yang tidak berdasar. Di samping itu, pemilihan Ali Mochtar Ngabalin yang merupakan tokoh dari pemerintah menunjukkan bahwa informasi yang disajikan hanya berasal dari satu sudut pandang, yakni pemerintah. Sebagai perwakilan dari pemerintah, tentu saja statemen Ali Mochtar Ngabalin mengarah pada upaya mendukung KPK. Adapun pendapat tambahan yang berasal dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersifat netral, sebatas menjelaskan langkah yang akan dilakukan kepada 75 orang pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan.

b. Analisis Struktur Skrip

Dari struktur skrip, wartawan berupaya menitik beratkan berita yang ditulis pada bantahan terkait dengan adanya upaya pelemahan KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan. Hal ini dapat dilihat dari ditonjolkannya unsur *what*, yang berbunyi “Kantor Staf Presiden Mengkritik tuduhan adanya upaya pelemahan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai instansi tersebut menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)”. Unsur *what* ini secara tidak langsung mencerminkan upaya untuk mementahkan tuduhan pelemahan KPK yang dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu. Di samping unsur *what*, unsur *why* juga ditonjolkan dalam berita ini. Unsur *why* berupa “Karena KPK telah melakukan mekanisme yang benar dalam TWK alih status pegawai menjadi ASN merujuk pada undang-undang KPK yang baru, sehingga intervensi di tubuh lembaga antirasuah terkait tes pegawai KPK dapat ditepis” menekankan bahwa tidak ada intervensi terhadap KPK terkait Tes Wawasan Kebangsaan yang didukung dengan

argumentasi bahwa mekanisme pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan sudah sesuai dengan Undang-undang KPK yang baru.

c. Analisis Struktur Tematik

Berdasarkan struktur tematik, berita ini mengangkat topik tentang bantahan terhadap tuduhan pelemahan KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan. Hal ini dipaparkan pada paragraf-paragraf dalam berita. Di paragraf pertama dinyatakan bahwa tuduhan pelemahan KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan memunculkan kritik dari pihak Kantor Staf Presiden. Paragraf selanjutnya menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan KPK sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Dilanjutkan dengan paragraf berikutnya yang memaparkan permintaan Ali Mochtar Ngabalin agar pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan tidak berpolemik dengan menyalahkan pihak-pihak tertentu. Masing-masing paragraf dalam berita ini berisi argumentasi yang mendukung bantahan terhadap tuduhan pelemahan KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan.

Dalam aspek koheresi, pada paragraf tiga dan empat terdapat koheresi sebab akibat. Pada paragraf ke tiga ditulis “dalam pasal 3 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa KPK sebagai lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya tidak bisa diintervensi oleh siapa pun”. Sedangkan dalam paragraf empat tertulis “oleh karena itu, ia meminta pihak-pihak yang tidak lolos TWK untuk tidak menyalahkan siapa pun. Dengan kata lain, jika mekanisme penilaian dilakukan dan kemudian hasilnya tidak lolos maka tidak perlu menyalahkan unsur atau pihak lain”. Adanya koheresi pada paragraf tiga dan empat ini menyiratkan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK telah dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

d. Analisis Struktur Retoris

Dari struktur retoris, diksi “menyesatkan” yang digunakan dalam berita mengindikasikan bahwa tuduhan pelemahan KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan merupakan suatu hal yang sangat tidak benar dan tidak berdasar.

5. Analisis Berita 5

Tabel 6
Analisis Framing Pan dan Kosnicki Berita 5

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Pakar: TWK Kewenangan Pimpinan KPK Secara Kolektif Kolegial
	<i>Lead</i>	Perdebatan tentang TWK sebagai prosedur peralihan status pegawai KPK menjadi ASN masih terus berkembang. Aktivis anti korupsi juga menyoroti pimpinan KPK. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Agus Surono berpendapat bahwa perdebatan ini harus segera disudahi sebab tidak konstruktif. Ia sepakat dengan himbauan Kepala Kantor Staf Kepresiden, Moeldoko agar menghentikan perdebatan TWK.
	Latar Informasi	Perdebatan TWK hanya akan memberikan energi negatif dan menimbulkan tuduhan yang tidak konstruktif kepada KPK. TWK sebagai alih status ASN merupakan keputusan akhir sebagaimana pemikiran Moeldoko.
	Kutipan Sumber	<p>1. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Agus Surono</p> <ul style="list-style-type: none"> • Itu memang sepenuhnya kewenangan dari pimpinan KPK secara kolektif kolegial. Apalagi TWK itu pun bisa dianggap sebagai interpretasi pimpinan KPK untuk menjalankan amanah revisi UU KPK Nomor 19/2019 • Jadi, TWK sepenuhnya merupakan kewenangan dari pimpinan KPK secara kolektif kolegial dan hal itu merupakan keputusan yang dapat dikualifikasi sebagai beskhiking yang mengikat dan sah secara hukum karena telah sesuai dengan AAUPB <p>2. Presiden Joko Widodo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar hasil TWK tak menjadi acuan pemberhentian pegawai. <i>Judicial review</i> Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU KPK bahwa alih fungsi kepegawaian jangan merugikan hak-hak pegawai KPK. <p>3. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata</p> <ul style="list-style-type: none"> • 51 dari 75 pegawai KPK tetap diberhentikan. 51 orang itu sudah tak bisa lagi dibina dengan pendidikan wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN dan bekerja di KPK.
Pernyataan/Opini	Berita berisi tentang statemen dari Guru Besar Ilmu	

¹⁹ Hardani Triyoga. "Pakar : TWK Kewenangan Pimpinan KPK Secara Kolektif Kolegial", Viva.co.id, 31 Mei 2021, [http : www.viva.co.id/berita/nasional/1376354-pakar-twk-kewenangan-pimpinan-kpk-secara-kolektif-kolegial?page=all&utm_medium=all-page](http://www.viva.co.id/berita/nasional/1376354-pakar-twk-kewenangan-pimpinan-kpk-secara-kolektif-kolegial?page=all&utm_medium=all-page)

		Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Agus Surono, Presiden Joko Widodo, dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
	Penutup	Polemik TWK ini bikin heboh lagi karena pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang mengatakan 51 dari 75 pegawai KPK tetap diberhentikan. Dia mengatakan dari tim asesor TWK, 51 orang itu memiliki rapor merah. Menurut dia, 51 orang itu dinilai sudah tak bisa lagi dibina dengan pendidikan wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN dan bekerja di KPK.
Struktur Skrip	What	Perdebatan tentang TWK sebagai prosedur peralihan status pegawai KPK menjadi ASN masih terus berkembang. Aktivis anti korupsi juga menyoroti pimpinan KPK.
	Where	-
	When	31 Mei 2021
	Who	<ul style="list-style-type: none"> • Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Agus Surono • Presiden Joko Widodo • Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
	Why	Jadi, TWK sepenuhnya merupakan kewenangan dari pimpinan KPK secara kolektif kolegial dan hal itu merupakan keputusan yang dapat dikualifikasi sebagai <i>beskhiking</i> yang mengikat dan sah secara hukum karena telah sesuai dengan AAUPB
	How	Agus mengajak masyarakat agar percaya pada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri. Menurut dia, keputusan KPK sudah seperti keputusan aparatur negara. Pun, keputusan aparatur negara dijamin undang-undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Berita dibuka dengan alinea yang berisi statemen dari Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Agus Surono yang menyatakan bahwa polemik terkait Tes Wawasan Kebangsaan harus disudahi. Alinea selanjutnya berisi statemen Prof. Agus Surono bahwa Tes Wawasan Kebangsaan merupakan kewenangan Pimpinan KPK secara kolektif kolegial dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK. Aline selanjutnya berisi tentang statemen Presiden Jokowi dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	Diksi “energi negatif” dan “tidak konstruktif” dalam pernyataan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Agus

		Surono.
--	--	---------

a. Analisis Struktur Sintaksis

Berita ini menggunakan judul “Pakar: TWK Kewenangan Pimpinan KPK Secara Kolektif Kolegial”. Melalui pemilihan judul ini, tersirat ada upaya untuk memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh KPK merupakan kewenangan Pimpinan KPK dan tidak menyalahi aturan. *Lead* berita berisi tentang permintaan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Agus Surono agar perdebatan Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK disudahi. *Lead* tersebut secara tidak langsung menyiratkan perspektif wartawan yang memiliki kecenderungan mendukung KPK dalam pemberitaan. Latar informasi berita berisi argumentasi Prof. Agus Surono bahwa Perdebatan TWK hanya akan memberikan energi negatif dan menimbulkan tuduhan yang tidak konstruktif kepada KPK. Latar informasi ini menguatkan *lead* berita, dimana polemik terkait Tes Wawasan KPK seharusnya tidak perlu muncul dan hanya akan merugikan KPK.

Dari aspek pengutipan sumber, pemilihan Prof. Agus Surono sebagai narasumber utama mengindikasikan bahwa pembaca diajak untuk memandang polemik Tes Wawasan Kebangsaan sebagai hal yang tidak perlu, sesuai dengan pandangan dari Prof. Agus Surono. Di samping itu, kutipan wawancara dengan Prof. Agus Surono yang ditulis oleh wartawan mayoritas menjelaskan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan adalah kewenangan pimpinan KPK dan sesuai dengan amanat undang-undang. Di sini, wartawan berupaya membangun pemahaman yang sama dengan pembaca bahwa tidak ada yang salah dengan Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh KPK.

b. Analisis Struktur Skrip

Kecenderungan untuk membangun pemahaman bahwa Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh KPK merupakan suatu hal yang sudah benar dapat dilihat dari struktur skrip. Dalam aspek *why* dinyatakan “Jadi, TWK sepenuhnya merupakan kewenangan dari pimpinan KPK secara kolektif kolegial dan hal itu merupakan keputusan yang dapat dikualifikasi sebagai *beskhiking* yang mengikat dan sah secara hukum karena telah sesuai dengan AAUPB”. Di sini, dapat diketahui gagasan utama yang ditonjokkan dalam aspek *why* adalah Tes Wawasan Kebangsaan merupakan kewenangan pimpinan KPK dan sah secara hukum. Kemudian dalam aspek *How* yang menyatakan “Agus mengajak masyarakat memberi kepercayaan penuh pada KPK untuk

membenahi dan memperkuat diri. Menurut dia, keputusan KPK sudah seperti keputusan aparaturnegara. Pun, keputusan aparaturnegara dijamin undang-undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)” tersirat upaya untuk meyakinkan masyarakat agar percaya kepada KPK sebab keputusan KPK dijamin oleh undang-undang dan peraturan hukum yang sah.

c. Analisis Struktur Tematik

Topik yang diangkat dalam berita ini adalah penegasan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan adalah kewenangan Pimpinan KPK dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini tersirat dalam alinea-alinea yang ada dalam berita. Alinea awal berisi statemen Prof. Agus Surono yang berpendapat bahwa polemik seharusnya dihentikan. Alinea selanjutnya berisi ajakan kepada masyarakat untuk mempercayai KPK. Dan dilanjutkan dengan alinea yang berisi penjelasan-penjelasan tentang aturan hukum yang berlaku yang secara tidak langsung ditujukan untuk mendukung statemen Prof. Agus Surono sebelumnya, yakni penghentian polemik terkait Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK.

Dalam berita ini terdapat sebuah koheresi, yakni koheresi perjelas. Koheresi perjelas dalam berita ini muncul dalam salah satu kutipan wawancara dengan Prof. Agus Surono yang berbunyi, “Jadi, TWK sepenuhnya merupakan kewenangan dari pimpinan KPK secara kolektif kolegial dan hal itu merupakan keputusan yang dapat dikualifikasi sebagai *beskhiking* yang mengikat dan sah secara hukum karena telah sesuai dengan AAUPB”. Koheresi perjelas yang terdapat dalam berita ini mendukung ajakan untuk menyudahi polemik Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK, dimana di dalam koheresi perjelas tersebut dinyatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan merupakan kewenangan Pimpinan KPK secara kolektif dan kolegial serta sah secara hukum sebab sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

d. Analisis Struktur Retoris

Pemilihan frasa “energi negatif” dan “tidak konstruktif” yang digunakan dalam penulisan berita menegaskan bahwa polemik terkait Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK merupakan sesuatu yang tidak substantif dan tidak memiliki nilai positif.

Tendensi politik merupakan preferensi pada suatu paham atau aliran politik tertentu. Tendensi politik ini dapat muncul dalam berbagai hal, salah satunya dalam media. Penggunaan media sebagai sarana guna mengembangkan pandangan penguasa (hegemoni) menjadi diskusi terkait media di berbagai negara berkembang. Di sini, terdapat kebutuhan yang cukup besar dari penguasa guna memanfaatkan media sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan politiknya. Netralitas media itu tidak ada sebab media terus mengedepankan kepentingan pemiliknya. Kebebasan pers yang ada merupakan kebebasan pemilik media. Pemilik media dapat memanipulasi, baik itu isi maupun penempatan dan publikasi berita. Selain itu, pemilik media juga memengaruhi dipublikasikan atau tidaknya suatu berita. Ini menunjukkan kuasa dari media ada di pemiliknya. Di sinilah kemudian media dapat digunakan kelompok tertentu untuk mendistribusikan gagasan politik secara luas. Penguasa media yang memiliki hubungan dekat dengan kelompok atau tokoh politik mempunyai kesempatan yang lebih besar guna menyebarkan wacana politik tersendiri untuk meraup keuntungan dalam konteks kontestasi politik²⁰.

Viva.co.id merupakan salah satu media yang memiliki hubungan dekat dengan tokoh politik. Tendensi politik Viva.co.id dalam pemberitaan polemik Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK dapat dibaca dengan memetakan afiliasinya dengan Partai Politik. Sebagaimana diketahui, Viva.co.id adalah anak perusahaan Bakrie Group yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie, seorang tokoh Partai Golkar. Sebelum menjadi sebuah partai politik, Golkar pada awalnya adalah sebuah Sekretariat Bersama yang didirikan pada tahun 1964²¹. Seiring dengan dinamikanya, Sekretariat Bersama Golkar tersebut kemudian bertransformasi menjadi Partai Golongan Karya (Golkar). Aburizal Bakrie sebagai pemilik Bakrie Group yang menaungi Viva.co.id tercatat pernah menjadi Ketua Partai Golkar pada periode 2009-2014 dan pada tahun 2016. Saat ini, Aburizal Bakrie adalah Ketua Dewan Pembina Partai Golkar²².

Dalam dinamika politik di Indonesia, saat ini Golkar termasuk dalam koalisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagai bagian dari koalisi pemerintah tentu Partai Golkar memiliki kepentingan politik tertentu, yakni mendukung pemerintah.

²⁰ K. Hasan. Kajian Netralitas Industri Media Massa Dalam Pileg 2014. Jurnal SUWA Universitas Malikussaleh, 12 (1), 2014.

²¹ www.partaigolkar.com/profil/

²² Haryanti Puspa Sari. "Ini Susunan Lengkap Kepengurusan DPP Partai Golkar 2019-2024", Kompas.com, 15 Januari 2020, [http : www.nasional.kompas.com/read/2020/01/15/15102741/ini-susunan-lengkap-kepengurusan-dpp-partai-golkar-2019-2024?page=all](http://www.nasional.kompas.com/read/2020/01/15/15102741/ini-susunan-lengkap-kepengurusan-dpp-partai-golkar-2019-2024?page=all).

Viva.co.id sebagai bagian dari Bakrie Group yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie yang notabene adalah Tokoh Partai Golkar tentu memiliki tendensi politik yang sejalan dengan kepentingan politik dari Partai Golkar. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari framing pemberitaan polemik Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK oleh Viva.co.id yang secara umum mendukung KPK itu sendiri. Sehingga tidak mengherankan jika pada akhirnya Viva.co.id mendukung KPK dalam polemik Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK sebab tendensi politik yang dimiliki oleh Viva.co.id sejalan dengan kepentingan Partai Golkar sebagai koalisi pemerintah.

KESIMPULAN

Framing pemberitaan Viva.co.id terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK dilakukan melalui pemilihan *headline*, penulisan *lead* dan latar informasi, pengutipan sumber berita, penonjolan beberapa aspek dari 5W + 1H, pemilihan koheresi, serta penggunaan leksikon. Dari analisis *framing* dapat ditarik kesimpulan bahwa Viva.co.id mengkonstruksi *image* positif KPK dalam polemik Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK. Ini dibuktikan dengan dalam pemberitaannya, Viva.co.id menonjolkan aspek-aspek yang mendukung KPK. *Framing* yang dilakukan oleh Viva.co.id tidak lepas dari tendensi politiknya yang sejalan dengan kepentingan politik pemiliknya, yakni mendukung pemerintah.

REFERENSI

- Bahrudin, Muh. *Tantangan Regulasi Penyiaran: Pencitraan Politik di Era Konvergensi Media*, In: Proceeding Conference on Communications, Media and Sociology (COMICOS), 2014.
- Biagi, Shirley. *Media Impact : Pengantar Media Massa*, Edisi 9. Jakarta : Salemba Humanika, 2010.
- Budyatna, Muhammad. *Jurnalistik Teori Dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006.
- Eriyanto, Eri. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta : LKiS, 2008.
- Flew, Terry. *New Media : An Introduction*, 2nd Edition. Australia : Oxford University Press, 2005.
- Hasan, K. *Kajian Netralitas Industri Media Massa dalam Pileg 2014*. Jurnal SUWA Universitas Malikussaleh, 12 (1), 2014.
- Jati, W. R. *Politik Persuasif Media : Peran Media Dalam Pemilu Presiden Indonesia 2001-2009*, Jurnal Penelitian Politik, 2013.

- Kandlousi, Nader Sheykh Al Eslami, Anees Janee Ali, and Anahita Abdollahi. *Organizational Citizenship Behavior in Concern of Communication Satisfaction: The Role of the Formal and Informal Communication*. International Journal of Business and Management 5, no. 10 (September 17, 2010). <https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n10p51>.
- Nugroho, Bimo, dkk. *Politik Media Mengemas Berita*. Jakarta : Institut Studi Arus Informasi, 1999.
- Rivers, William L., et.al. *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Edisi 2. Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Sari, Indah Permata. *Keberpihakan Media dalam Pemilihan Presiden 2014*. Jurnal Penelitian Komunikasi, 21 (1), 2018. <https://doi.org/10.20422/jpk.v21i1.488>.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Sudiby, Agus. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta : LKiS, 2004.
- Syamsul M. Romli, Asep. *Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online (Dilengkapi Kiat Blogger, Teknik SEO, dan Tips Media Sosial)*, Cet.1. Bandung : Nuansa Cendekia, 2012.
- Wicks, R. H. *Messaging Framing and Constuctioning Meaning : An Emerging Paradigm in Mass Communication Research*. New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2005.
- Nugraha, Bayu. “Prof. Romli : Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Mandat UU ASN”, Viva.co.id, 25 Mei 2021, [http : www.viva.co.id/berita/nasional/1375256-prof-romli-tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk-mandat-uu-asn](http://www.viva.co.id/berita/nasional/1375256-prof-romli-tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk-mandat-uu-asn). Akses 15 Juni 2021.
- Nugraha, Bayu. “TWK Pegawai KPK Disebut Buat Pemberantasan Korupsi Lebih Sistematis”, Viva.co.id, 27 Mei 2021, [http: www.viva.co.id/berita/nasional/1375700-twk-pegawai-kpk-disebut-buat-pemberantasan-korupsi-lebih-sistematis?page=all&utm_medium=all-page](http://www.viva.co.id/berita/nasional/1375700-twk-pegawai-kpk-disebut-buat-pemberantasan-korupsi-lebih-sistematis?page=all&utm_medium=all-page). Akses 15 Juni 2021.
- Sihite, Ezra & Edwin Firdaus. “Pimpinan KPK Klaim Sudah Perjuangkan Nasib Pegawai Tak Lulus TWK”, Viva.co.id, 27 Mei 2021, [http : www.viva.co.id/berita/nasional/1375753-pimpinan-kpk-klaim-sudah-perjuangkan-nasib-pegawai-tak-lulus-twk?page=all&utm_medium=all-page](http://www.viva.co.id/berita/nasional/1375753-pimpinan-kpk-klaim-sudah-perjuangkan-nasib-pegawai-tak-lulus-twk?page=all&utm_medium=all-page) (Edisi 28 Mei 2021) Akses 15 Juni 2021.
- Nugraha, Bayu. “Ngabalin Sebut Tuduhan Lemahkan KPK Lewat TWK Menyesatkan”, Viva.co.id, 30 Mei 2021, [http: viva.co.id/berita/nasional/1376214-ngabalin-sebut-tuduhan-lemahkan-kpk-lewat-twk-menyebabkan?page=all&utm_medium=all-page](http://viva.co.id/berita/nasional/1376214-ngabalin-sebut-tuduhan-lemahkan-kpk-lewat-twk-menyebabkan?page=all&utm_medium=all-page). Akses 15 Juni 2021.
- Triyoga, Hardani. “Pakar : TWK Kewenangan Pimpinan KPK Secara Kolektif Kolegial”, Viva.co.id, 31 Mei 2021, [http : www.viva.co.id/berita/nasional/1376354-pakar-twk-kewenangan-pimpinan-kpk-secara-kolektif-kolegial?page=all&utm_medium=all-page](http://www.viva.co.id/berita/nasional/1376354-pakar-twk-kewenangan-pimpinan-kpk-secara-kolektif-kolegial?page=all&utm_medium=all-page)Akses 15 Juni 2021.
- www.partaigolkar.com/profil/ Akses 19 Juni 2021.
- Sari, Haryanti Puspa. “Ini Susunan Lengkap Kepengurusan DPP Partai Golkar 2019-2024”, Kompas.com, 15 Januari 2020, [http : www.nasional.kompas.com/read/2020/01/15/15102741/ini-susunan-lengkap-kepengurusan-dpp-partai-golkar-2019-2024?page=all](http://www.nasional.kompas.com/read/2020/01/15/15102741/ini-susunan-lengkap-kepengurusan-dpp-partai-golkar-2019-2024?page=all). Akses 19 Juni 2021.

